

Daftar Pustaka

- A.A.B.Widanta. (2008). Peranan Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Investasi Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 104–112. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3182>
- Ariwibawa, B. D. (2005). Kapasitas Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang). *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. <http://eprints.undip.ac.id/16726/>
- Dasire. (2009). *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks.
- Dianniar, U. (2021). Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah*, 1(September), 1–10. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator>
- Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Utara*. (n.d.). Diambil 20 November 2023, dari <https://web.halmaherautarakab.go.id/letak>
- Halim, Abdul. Syam Kusufi, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Kunarjo. (1996). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. (Edisi 3). Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mamesah. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Musgrave, R. A. dan P. A. M. (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Terjemahan Alfonsus Sirait dkk*. Erlangga.
- Mustika, A. (2017). *Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Debt Service Coverage Ratio dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2013-2017*. <https://www.journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/551/428>
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah*. https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-30-tahun-2011-tentang-pinjaman-daerah/--651-872-PP_30_Thn_2011.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99852/pp-no-56-tahun-2018>
- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi* 1 (1) : 228-240.
- Retno, W. (2009). Mampuan kota Palembang dalam melakukan pinjaman. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. <http://digilib.unila.ac.id/>
- Santoso, R. P. (2003). Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 147–158. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/634>
- Soetrisno. (1984). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. BPFE.
- Sudarlan, Sampeallo, Y. G., & Anggraini, N. (2018). Analisis Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (Jamdi)*, 1(1), 37–43. <http://e-journal.polnes.ac.id/index.php/jamdi/article/view/192>
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Keuangan Negara* (Edisi 2). Sinar Grafika.
- Todaro. (1997). *Economics Development*. (Edisi 6). Logman Group Ltd.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 33 tahun,Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah>